

PEMBERDAYAAN DAERAH DALAM MENGATASI DAMPAK KRISIS EKONOMI (PDM-DKE) DI KABUPATEN SUBANG

Oleh :
H. E. Mulyana *

ABSTRAKSI

Proyek Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) dilatar belakangi oleh kondisi yang dialami masyarakat sebagai dampak dari krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia termasuk di dalamnya Indonesia, sehingga mengakibatkan rapuhnya perekonomian; berbagai kegiatan ekonomi masyarakat mengalami kemunduran.

Untuk mengatasi ini semua, pemerintah mengupayakan pemulihan keberdayaan masyarakat dalam menghadapi krisis tersebut, sehingga masyarakat menjadi survive untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan menumbuh kembangkan nilai tambah ekonomi serta sosial budayanya.

Dampak positif dari kegiatan PDM-DKE adalah semakin tumbuhnya kepercayaan diri serta kemampuan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kehidupannya, dan memfasilitasi masyarakat sasaran agar dapat melaksanakan fungsi dan peran masing-masing secara optimal. Maka Proyek PDM-DKE mensyaratkan partisipasi aktif dari masyarakat sejak dimulainya tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat untuk menjamin keberlanjutan hasil-hasil pembangunan.

* Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP
dan Ketua LPM Universitas Pendidikan Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Sejak pertengahan tahun 1997 Indonesia menghadapi permasalahan yang sangat serius dengan terjadinya krisis moneter yang meluas menjadi krisis ekonomi. Permasalahan tersebut telah membawa dampak meningkatnya jumlah angka pengangguran dan makin bertambahnya jumlah penduduk miskin, baik di daerah maupun di perkotaan. Sebagian

besar dari mereka sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan - kebutuhan hidup lainnya.

Dalam menanggulangi dampak krisis ekonomi tersebut, Pemerintah mengambil kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam bentuk proyek Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE). Program ini merupakan salah satu upaya

penyelamatan dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan yang jatuh miskin sebagai akibat dari krisis ekonomi.

II. TUJUAN PELAKSANAAN PROGRAM PDM-DKE

- Meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat miskin melalui peningkatan pendapatan;
- Menggerakkan kembali ekonomi rakyat melalui pemberian modal usaha dan membangun/merehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi, sosial, yang mendukung sistem produksi dan distribusi barang dan jasa, dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

III. KHALAYAK SASARAN

- ♦ Penerima bantuan yaitu penduduk miskin baik pria maupun wanita, di perkotaan maupun di pedesaan yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan;
- ♦ Lokasi adalah Desa/Kelurahan yang berada dalam satu wilayah Kecamatan, kecuali Desa/ Kelurahan yang menerima bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) tersebut, dibentuk jaringan kerja yang melibatkan unsur Pemerintah Pusat, Pemerin-

tah Daerah, dan berbagai tingkatan dengan menempatkan posisi sebagai Konsultan Pendamping (KP)

IV. PELAKSANAAN KONSULTASI

Secara umum konsultan pendamping (KP) diharapkan dapat membantu memperlancar pelaksanaan dan pengendalian operasional PDM-DKE, sedangkan secara khusus kedudukan Konsultan Pendamping terdiri atas Tenaga Ahli Konsultan Manajemen, Koordinator Wilayah (KORWIL), dan Fasilitator Kecamatan (FK). Fungsi Konsultan Pendamping, Koordinator Wilayah, dan Fasilitator Kecamatan adalah memberikan fasilitas berupa layanan konsultasi dan pendampingan sejak tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Konsultan Pendamping, Koordinator Wilayah, Fasilitator Kecamatan adalah melakukan jalinan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengelola Program (TKPP)-II dan pimpinan proyek (PIMPRO), pemerintah daerah setempat dan koordinator pelaksanaan lapangan (KPL). Keberhasilan dan kualitas layanan konsultan tidak terlepas dari peran TKPP-II, Pimpro, pembina daerah dan KPL serta koordinasi yang telah terjalin diantara keduanya.

V. TEMUAN DAN HASIL

- 1) Adanya perubahan positif dalam perekonomian dan usaha masyarakat, kondisi lingkungan fisik, serta kualitas

partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

- 2) Kecepatan dan keakuratan usulan program kegiatan;
- 3) Variasi waktu pencairan dana dan penyebarluasannya yang sesuai dan beragam;
- 4) Sistem pengaliran dana bantuan langsung masyarakat (BLM) pada setiap kecamatan bervariasi.

VI. KESIMPULAN

- a. Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) relevan dengan kondisi masyarakat yang mengalami dampak krisis ekonomi, dan memperoleh perhatian dan tanggapan yang baik dari masyarakat maupun pemerintah setempat;
- b. Keberhasilan PDM-DKE ditujukan kepada perubahan ekonomi, pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi dan

terpenuhinya pencairan, penggunaan penyaluran dan pelestarian dana bantuan langsung masyarakat (BLM).

VII. S A R A N

- ♦ Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) perlu dilanjutkan dan hasilnya dilestarikan;
- ♦ Memerlukan perhatian yang lebih serius dalam persiapan dan pelaksanaannya;
- ♦ Adanya kriteria Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dan Fasilitator Desa (FD);
- ♦ Pembekalan Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Desa (FD) perlu diarahkan pada pengembangan dalam kemampuan praktis;
- ♦ Penyederhanaan format yang diperlukan untuk tertib administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Manullang, 1991, Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung.
- R. Nuriana, 2001, Pidato Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bandung.
- Sedarmayati, 1995, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Ilham Jaya, Bandung.
- Soebagio Atmodiwirio, 1993, Manajemen Training, Pedoman Praktis Bagi Para Penyelenggara Training, Budi Pustaka, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 1984, Pengembangan Sumber Daya Insani, Gunung Agung, Jakarta